IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN SIJANGKUNG KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG

Oleh:
MARK ARIEF RAHMAN
NIM. E42011084

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : ariefmark@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program raskin di Kelurahan Sijangkung belum terlaksana dengan baik. Skripsi ini diangkat berdasarkan dari permasalahan yang terjadi dalam implementasi program raskin di Kelurahan Sijangkung yang antara lain, kualitas raskin yang buruk serta jumlah dan jadwal pendistribusian raskin yang sering mengalami kekurangan dan keterlambatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kurang maksimalnya implementasi program raskin di Kelurahan Sijangkung di pengaruhi oleh tiga faktor antara lain adalah, Pertama faktor sumber daya, sumber daya materi yang belum baik dan sumberdaya fasilitas yang belum memadai sehingga dalam pelaksanaannya raskin yang diberikan tidak layak dan implementor mengalami kesulitan dalam menempatkan stok beras Kedua, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Komunikasi yang belum terjalin dengan baik antara pihak Kelurahan dan warga yang mengakibatkan proses sosialisasi tidak berhasil dengan maksimal. Ketiga disposisi implementor. Sikap implementor yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang juga menjadi salah satu dari tiga penyebab kurang optimalnya pelaksanaan raskin di Kelurahan Sijangkung.

Kata-kata kunci: Implementasi, sumber daya, komunikasi, disposisi implementor.

THE IMPLEMENTATION OF BERAS MISKIN (RASKIN) PROGRAM IN KELURAHAN SIJANGKUNG, SOUTH SINGKAWANG SUBDISTRICT, SINGKAWANG CITY

Abstract

The purpose of this thesis is to describe and analyze the factors that cause the implementation of Beras Miskin Program in Kelurahan Sijangkung is not running well. This research was brought based on the problem happens in the implementation of Beras Miskin Program in Kelurahan Sijangkung, such as bad quality and lack quantity of rice, and also the program schedule which is often to delay. The result of this thesis shows that the minimum implementation of Raskin program in Kelurahan Sijangkung were affected by three factors, the first is resources factor, the bad material resources and facility resources that had not been sufficient so that in the implementation, raskin that was given was not proper and implementor was facing a difficulty in placing the rice stock. The second is communication among organization and activity reinforcement. The ineffective communication between Kelurahan and people affected socialization process so that it was not running maximally. The third is implementor disposition. The minimum implementor behavior in giving the best service to the people was one of the three factors that caused the less optimum raskin program in Kelurahan Sijangkung.

Keyword: Implementation, resource, communication, disposition, implementor

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini masalah kemiskinan yang melanda di berbagai negara baik itu negara berkembang maupun negara maju merupakan masalah yang cukup kompleks, tak terkecuali bangsa Indonesia yang notabene termasuk dalam kategori negara berkembang yang berada di kawasan Asia atau yang lebih spesifiknya terletak di Asia bagian tenggara. Adapun kemiskinan itu sendiri bisa dibilang suatu kondisi dimana seseorang dengan kondisi keterbatasan materi sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan papan, pangan maupun sandang. Sejalan dengan fenomena tersebut pemerintah juga selalu berupaya membantu meringankan beban masyarakat miskin lewat beberapa program bantuan yang salah satunya program tersebut membantu masyarakat miskin untuk dapat meringankan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok pangan seperti beras.

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang menyumbang konsumsi energi cukup potensial bagi masyarakat pada umumnya, akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan pangan seperti beras itu sendiri masih banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok pangan tersebut. Dari pernyataan tersebut masyarakat yang tidak mampu dalam kategori ini digolongkan kedalam masyrakat miskin. Masyarakat miskin ini mendapat perhatian dari pemerintah dengan diluncurkannya program bantuan sosial pemerintah yang pada tujuannya adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari dan dalam hal ini bentuk program disalurkan melalui program raskin atau beras miskin.

Jadi kesimpulannya program raskin ialah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Program raskin sendiri dilaksanakan melalui koordinasi yang matang antara instansi/lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan proses koordinasi dilaksanakan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengawasan dan pengendalian dan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Berikut ini adalah peraturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan program raskin di dalam buku pedoman umum raskin ialah :

a) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.
b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

MARK ARIEF RAHMAN, NIM. E42011084
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan.
d) Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.
e) Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
f) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog.
g) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
h) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
i) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
j) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
k) Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013.
l) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012, tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah.
m) Permendagri No. 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
n) Permendagri No. 42 Tahun 2010, tentang tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota.
o) Permenkeu tentang Penunjukan Kementrian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin.
p) Permensos No. 24 Tahun 2013, tentang tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
q) Kepmenko Kesra No. 29 Tahun 2013, tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Sejalan dengan hal itu Kota Singkawang merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan kebijakan program beras miskin (raskin). Program Beras Miskin sendiri sudah diimplementasikan di Kota Singkawang sejak diberlakukannya Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional selain itu Pemerintah Daerah Kota Singkawang juga telah berupaya agar masyarakat di Kota Singkawang mendapatkan kesejahteraan yang layak, namun implementasi yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan diakibatkan oleh banyak kendala yang terjadi dilapangan dan dengan adanya kendala tertentu terkadang membuat hasil dari program tersebut belum optimal hasilnya sehingga pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan kata lain kondisi faktual di masyarakat yang tidak sesuai

dengan program yang telah dijalankan, akibatnya menimbulkan permasalahan.

Adapun berikut adalah beberapa bukti dari belum efektifnya implementasi program raskin di Kota Singkawang khususnya Kelurahan Sijangkung yang ditunjukkan dengan *statement* yang disampaikan oleh warga setempat melalui salah satu media massa lokal yang di antaranya adalah sebagai berikut :

Ketua RT 12 RW 03 Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Johanes Gunardy, mempertanyakan kualitas beras untuk masyarkat miskin (raskin) yang didistribusikan Bulog beberapa waktu lalu. Menurutnya kualitas beras tak memadai untuk dikonsumsi. Pada hari pertama didistribusi, itu ada 28 karung beras yang rusak. Kemudian RT saya ada lima karung. Itu belum RT lainnya, "katanya kepada Tribunpontianak.co.id, Minggu (2/5/2013). Dia menegaskan kualitas beras yang tidak bagus menjadi kendala untuk mendistribusikannya. Menurut Johanes, meski untuk keluarga miskin, tak berarti kualitas beras yang diberikan rendah. " itu tidak layak konsumsi. Meski untuk orang miskin, kita harap tidak seperti itu. Kualitas beras juga harus diperhatikan juga," paparnya. Menurutnya, sebelum didistribusikan hendaknya beras tersebut diperiksa terlebih dahulu. Jangan sampai yang didistribusikan ke masyarakat kualitasnya tak layak lagi. Warga lainnya, Margareth (28) berharap pihak Bulog bisa segera mengganti beras tersebut, menurutnya, beras-beras tersebut sangat tidak layak (tribunnews 2013 : 06 : 02).

Berdasarkan fenomena dari media massa di atas diketahui bahwa implementasi program raskin belum terlaksana dengan baik sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa implementasi program beras miskin (raskin) di Kelurahan Sijangkung Kota Singkawang pada tahun 2013 belum efektif. Adapun hal tersebut tercermin dari kualitas dan jumlah beras miskin (raskin) yang disalurkan, diantaranya masih ditemukan kualitas beras yang tidak layak dan jumlah dari beras yang didistribusikan tidak memadai atau kurang akibat dari adanya beberapa karung beras yang rusak sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari warga penerima raskin di beberapa lokasi RT/RW di Kelurahan Sijangkung.

Program raskin sendiri harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) yang terdapat di dalam buku pedoman umum raskin tahun 2013. Di mana di dalamnya diatur mekanisme penerima manfaat dan indikator keberhasilan dari program.

Berikut ini adalah indikator yang harus diperhatikan oleh pelaksana implementasi program raskin :

a) Tepat sasaran; raskin hanya diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM).
b) Tepat jumlah; jumlah Raskin yang merupakan hak RTS harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
c) Tepat harga; harga beras yang dibayar keluarga sasaran penerima manfaat sebesar Rp.1.600,-/Kg netto di titik distribusi.
d) Tepat waktu; waktu pelaksaan penyaluran beras kepada RTS sesuai dengan rencana penyaluran.
e) Tepat administrasi; terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Tepat kualitas; terpenuhinya kualitas beras yang sesuai dengan kualitas beras BULOG.

Gambaran sementara yang dilihat oleh peneliti berdasarkan fenomena yang terjadi, permasalahan implementasi raskin di Kota Singkawang khususnya di Kelurahan Sijangkung pada tahun 2013 masih belum efektif jika dilihat dari fenomena yang terjadi dan dengan didasarkan fakta yang dimuat di media massa, dan sejalan dengan fenomena tersebut juga peneliti tertarik dan ingin lebih mendalami serta melakukan penelitian guna mengetahui permasalahan tersebut yaitu mengapa pelaksanaan program tersebut belum terlaksana dengan baik, sehingga pada saat pengimplementasiannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana yang terdapat dalam buku pedoman umum raskin tahun 2013.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada implementasi kebijakan yang ada kaitannya dengan program raskin yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan suatu kebijakan pemerintah dalam hal ini menjadi sebuah topik menarik dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membatasi penelitian pada: faktor-faktor yang menyebabkan implementasi program beras miskin (raskin) di Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang belum terlaksana dengan baik sesuai petunjuk pelaksana yang terdapat di dalam buku pedoman umum raskin tahun 2013.

3. Rumusan Permasalahan

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada implementasi kebijakan yang ada kaitannya dengan program raskin yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan suatu kebijakan pemerintah dalam hal ini menjadi sebuah topik menarik dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membatasi penelitian pada: faktor-faktor yang menyebabkan implementasi

program beras miskin (raskin) di Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang belum terlaksana dengan baik sesuai petunjuk pelaksana yang terdapat di dalam buku pedoman umum raskin tahun 2013.

4. Tujuan Penelitian

Adapun hal yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menyebabkan implementasi dari program raskin di Kelurahan Sijangkung belum tercapai dengan efektif sesuai dengan pedoman umum petunjuk pelaksana teknis raskin pada tahun 2013.

5. Manfaat Penelitian.

a) Manfaat Teoritis

a) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi bahan pengkajian dan pengembangan ilmu pemerintahan khususnya disiplin ilmu pemerintahan diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah, ilmu pengetahuan, ilmu sosial dan ilmu pemerintahan dalam mengelola sebuah program bantuan sosial.

b) Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pemahaman untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari pada saat menjalani perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan selain itu juga sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Pemerintahan ini.

b) Manfaat Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khususnya kepada pemerintah daerah Kota Singkawang sebagai bahan masukan guna pelaksanaan Program raskin, jika Program Beras Miskin ini masih kembali dilaksanakan di era pemerintahan berikutnya.

2) b. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan pemahaman bagi peneliti yang berkaitan dengan kajian implementasi program raskin.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

a) **Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik Menurut Dye (dalam Subarsono, 2006:2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Artinya, kebijakan publik mengarah pada pilihan-pilihan, pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau

tidak melakukan sesuatu. Misalnya yang berkaitan dengan penelitian ini, ada pilihan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan atau tidak membuat kebijakan tentang program beras miskin atau raskin.

Sedangkan menurut Easton (dalam Islamy, 2003:19) kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat, Menurut Dunn (2003:22) proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu dimulai dari: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan sebuah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Adapun tahapan kebijakan itu meliputi Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, penjelasan rincinya adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan dan pada akhirnya pada tahap inilah masalah bisa dipilih berdasarkan prioritas pembahasan untuk menjadi agenda pembahasan pada tahap ini pula suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan,atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan masalah-masalah tadi kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan.

3) Tahap Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, dan pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan

oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan, sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini juga berbagai kepentingan juga akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yag telah dijalankan akan dinilai atau dievauluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran -ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

b) Implementasi Kebijakan

Adapun pengertian implementasi menurut beberapa ahli diantaranya Van Meter dan Van Horn (dalam Ismail Nawawi 2009:131) mengungkapkan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Mazmain dan Paul Sebatier (dalam Ismail Nawawi 2009:131), implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian.

2. Metode Penelitian

Pada masalah yang dibahas peneliti kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif itu sendiri menurut Sugiyono (2010:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Beras Miskin (raskin) di Kelurahan Sijangkung

Program raskin adalah sebuah program yang di rancang oleh pemerintah, program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin melalui distribusi beras

murah. Sasaran program raskin adalah Rumah Tangga Miskin (RTS) sesuai dengan hasil pendataan BPS tahun 2012 yang terdiri dari rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, rumah tangga hampir miskin dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp.1.600,-/kg Netto di titik distribusi. Program ini mencakup seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di Kelurahan/Desa dipegang oleh Perum BULOG.

Sebelum mengimplementasikan raskin, terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang benar mengenai kebijakan raskin baik instansi terkait maupun petugas yang langsung sebagai pelaksana dilapangan. Hal ini sangat diperlukan agar instansi yang bertugas dan petugas yang akan terjun langsung ke lapangan dapat mengerti apa tugas dan tanggung jawabnya.

2. **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Belum Terlaksana Dengan Baik.**

a) **Sumberdaya**

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya fasilitas dalam rangka implementasi program raskin di Kelurahan Sijangkung tahun 2013 masih kurang memadai sehingga dalam pelaksanaannya implementor mengalami kesulitan dalam menempatkan stok beras. Sumber daya fasilitas merupakan sarana yang dibutuhkan dalam rangka mempermudah operasionalisasi implementasi kebijakan. Keadaan fasilitas yang tidak memadai tentunya mempersulit implementor dalam pelaksanaan implementasi program raskin di Kelurahan Sijangkung. Sementara dari sisi sumberdaya materi sendiri sudah tentu belumlah memenuhi standar dari pelaksanaan program raskin itu sendiri, hal ini sudah dibuktikan dari statement warga yang juga merupakan salah satu ketua RT di Kelurahan Sijangkung yang mengungkapkan pernyataanya tersebut di salah satu media lokal yaitu tribun Pontianak yang juga penulis cantumkan pada latar belakang skripsi.

b) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Faktor Komunikasi juga merupakan salah satu penyebab pelaksanaan raskin di Kelurahan Sijangkung belum berjalan dengan optimal ini dikarenakan dan dibuktikan dengan beberapa pernyataan narasumber yang mnyatakan bahwa dalam proses sosialisasi belum dirasa efektif karena komunikasi dari pihak implementor dan warga tidak efektif yang mengakibatkan banyak warga yang tidak mengetahui dari program raskin itu sendiri.

c) Disposisi Implementor

Karakteristik implementor berupa komitmen tidak ditunjukkan implementor dalam pelaksanaan implementasi, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya komitmen dari implementor dalam hal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga muncul ketidakpedulian serta kurang tanggapnya implementor terhadap masyarakat miskin yang mendapatkan kualitas raskin yang buruk, jadi kesimpulannya faktor disposisi implementor pada saat pelaksanaan program raskin di Kelurahan Sijangkung belum optimal.

D. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

a. Simpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang telah peneliti tulis pada bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi program raskin di Kelurahan Sijangkung belum berhasil, adapun faktor-faktor yang dimaksud diantaranya dari enam faktor yang diungkapkan ternyata setelah diteliti hanya ada tiga faktor yang menyebabkan pelaksanaan raskin kurang optimal diantaranya adalah :

1. Sumberdaya

Sumber daya lainnya berupa sarana dan prasarana kebijakan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. sumber daya tempat di Kelurahan Sijangkung masih terbilang belum memadai yaitu lokasi tempat penampungan beras raskin di Kelurahan, sehingga daya tampung tempat penyimpanan raskin yang kurang pada akhirnya akan mengakibatkan pendistribusian beras tidak terfokus disatu tempat. serta yang paling penting adalah sumberdaya materi yaitu beras itu sendiri yang ternyata pada saat diimplementasikan kualitasnya tidak bagus dan hal ini tidaklah sesuai dengan indicator keberhasilan raskin yang mana pada indikator tersebut haruslah tepat kualitasnya.

2. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan aktivitas

Dari hasil wawancara yang didapat peneliti, faktor komunikasi juga termasuk faktor yang menyebabkan proses pelaksanaan implementasi menjadi kurang efektif, ini tercermin dari adanya keluhan warga mengenai soosialisai yang dilakukan oleh pihak implementor kurang efektif sehingga mengakibatkan masih banyak warga yang bahkan tidak mengetahui sama sekali program raskin itu sendiri.

MARK ARIEF RAHMAN, NIM. E42011084
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

3. Disposisi Implementor

Sikap dari para implementor yang kurang paham dan cenderung kurang dalam melakukan pelayanan prima ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan program raskin di Kelurahan Sijangkung kurang tanggapnya para implementor menjadikan warga menjadi sulit dalam menemukan solusi dan cenderung lambat dalam melakukan penanganannya.

Jadi kesimpulan akhir yang dapat ditarik oleh peneliti adalah dari keenam faktor yang telah dijabarkan ada empat faktor yang ternyata mempengaruhi pelaksanaan program raskin di Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan dan keempat faktor tersebut disinyalir penyebab belum efektifnya program raskin tersebut mulai dari sosialisasi yang kurang efektif lewat komunikasi antar pihak implementor dan warga, kemudian kurangnya tanggapan dan respon dari pihak Kelurahan mengenai permasalahan kualitas yang ada serta karakter atau sifat dari para implementor yang cendrung kurang paham yang menyebabkan kurang tanggapnya pihak implementor dalam menanggapi permasalahan yang ada kemudian ditambah sarana prasarana yang belum memadai.

b. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti merasa sangat perlu untuk memberikan masukan agar kedepannya proses pelaksanaan program beras miskin di Kelurahan Sijangkung bisa lebih baik lagi. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu yang menjadi hambatan adalah sarana prasarana yang tidak memadai serta materi (beras) itu sendiri yang tidak layak digunakan.untuk sarana dan prasarana bisa dipertimbangkan solusinya dengan menyewa gudang milik warga karena saat peneliti turun kelapangan pada kenyataannya peneliti melihat bahwa di Kelurahan Sijangkung banyak terdapat gudang milik warga yang notabennya biasa digunakan untuk menyimpan hasil bumi, untuk itu pihak kelurahan bisa mempergunakan dengan menyewa gudang tersebut untuk beberapa hari sementara untuk materi beras yang kualitasnya belum baik sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak implemetor sehingga pada saat pelaksanaan tidak terjadi lagi permasalahan akan kualitas dan jikalau ada maka itu bisa diatasi dengan cepat.
2. adapun saran dari peneliti adalah bisa dengan membina hubungan baik dengan warga pada saat melakukan sosialisasi yang dilakukan secara berkala kemudian penggunaan media iklan sebagai sarana pendukung agar

bisa membantu komunikasi secara tidak langsung yang tujuannya juga agar warga bisa menyaksikan dan mengetahui mengenai raskin tersebut.

3. Perlunya kesadaran para implementor mengenai program raskin serta bertanggung jawab penuh, tanggap hingga pelaksanaan program rampung dilakukan salah satu cara terbaik juga dengan media sosialisasi tadi agar secara langsung para implementor bisa turut melihat kondisi warga yang pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka.

c. Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan yang penulis alami sebagai berikut :

1. Sulitnya menemukan waktu yang tepat untuk mewawancarai informan dikarenakan beberapa informan memiliki pekerjaan yang padat dan sibuk sehingga belum maksimal dalam proses wawancara.
2. Kurangnya keterbukaan informan dalam memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Walaupun juga terdapat aturan yang mengatur sebagian data yang tidak bisa diberikan..
3. Waktu. Diberikannya izin selama 2 (dua) minggu dari pihak pengelola untuk melakukan penelitian dilapangan, dirasakan kurang bagi penulis. Karena dengan waktu yang singkat tersebut penulis masih belum.

E. REFERENSI

1. Buku-Buku

Agustino, Leo. 2006. ***Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung** : Alfabeta.

Ala, Andre. Bayo. 2000, ***Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan***, Yogyakarta : Liberty,.

Dunn, William. N. 2003. ***Pengantar Analisis Kebijakan Publik***. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Faisal, Sanapiah. 1999. ***Format-format Penelitian Sosial***. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Islamy, M. Irfan. 2003. ***Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*.** Jakarta : Bumi Aksara

Ismawan, Bambang. 2003. ***Keuangan Mikro Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat***, 2003. Jakarta:Gema PKM.

Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan*, ***Teori masalah dan Kebijakan,*** Yogyakarta : Penerbit UPP AMP YKPN,

Leo, Agustino.2006. ***Dasar-dasar Kebijakan Publik***. Bandung : Alfabeta
Moleong, Lexy J. 2012. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. Bandung : Remaja Rosdakarya

Nugroho D, Riant. 2003. ***Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan***

Evaluasi. Jakarta : IKAPI.

Nawawi Ismail, 2009. ***Public Policy***. Surabaya : PMN

Prof. Drs. Budi Winarno, 2002 MA, PhD. ***KebijakanPublik, Teori, Proses, dan Studi Kasus***.Yogyakarta: CAPS.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2011.

Satori Djam'an & Komariah Aan. 2010. ***Metode Penelitian Kualitatif*****.** Bandung : Alfabeta

Subarsono. 2006. ***Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*****.** Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D***. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D***. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. ***Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.*** Bandung :Alfabeta

Tachjan, H. 2008. ***Implementasi Kebijakan Publik***. Bandung: AIPI.

Tohardi, Ahmad. 2010. ***Metode Penelitian Sosial***. Pontianak: Fisip Untan

Widodo, Joko. 2007. ***Analisis Kebijakan Publik***. Malang : Banyu media Publishing.

Skripsi dan Tesis :

Pradityo, Oryza Surya. 2012. *"**Implementasi Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) Di Desa PAL IX Kecamatan Sungai Kakap**"*. (Skripsi) .Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Musawa, Mariyam. 2009. *"**Studi Implementasi Program Raskin di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang**"*. (Tesis). Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro Semarang.

2. Peraturan Pemerintah :

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang *Kebijakan Perberasan Nasional.*

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Tahun 2013. **Pedoman Umum Raskin***Tahun 2013.*

Monografi Kelurahan Sijangkung, 2013, *Sijangkung Dalam Angka 2013*

3. Rujukan Elektronik :

http://imanarsyad.blogspot.com/2012/03/pengertian-kemiskian-dampak-akibat-dan.html,. (diakses pada tanggal 11 Januari 2015).
http://www.ut.ac.id/html/suplemen/espa4314/espa4314a/materi_2_2.htm,. (diakses pada tanggal 14 Januari 2015).

http://imanarsyad.blogspot.com/2012/03/pengertian-kemiskian-dampak-akibat-dan.html,. (diakses pada tanggal 15 Januari 2015).
http://www.ut.ac.id/html/suplemen/espa4314/espa4314a/materi_2_2.htm,. (diakses pada tanggal 15 Januari 2015).
http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html,. (diakses pada tanggal 16 Januari 2015).

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LLMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage :http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Mark Arief Rahman

NIM / Periode Lulus : E42011084 / 2015

Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address / HP : ariefmark@gmail.com / 089614720190

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN SIJANGKUNG KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain :

☐ fulltext
☑ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP
Ketua Pengelola Prodi IP

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 004

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 16 November 2015

(Mark Arief Rahman)